

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia, tidak hanya sebagai penghasil devisa dan penyerap tenaga kerja, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat (Rozari et al., 2024)). Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan nasional tercermin dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), devisa, dan kesempatan kerja, seiring dengan pergeseran arah pembangunan dari orientasi kuantitas menuju pariwisata yang menekankan kualitas dan keberlanjutan (Aulia & Asriati, 2025).

Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan pariwisata diarahkan untuk memperkuat pendapatan nasional, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pembangunan daerah. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan kontribusi sektor ini terhadap PDB sebesar 3,9% pada tahun 2023 dengan devisa sekitar US\$14 miliar dan meningkat menjadi 4,5% pada tahun 2024 dengan devisa mencapai US\$12,6 miliar (Kemenparekraf, 2024). Transformasi tersebut diperkuat melalui pengembangan destinasi prioritas, promosi digital, serta sinergi dengan ekonomi kreatif yang berkontribusi 7,8% terhadap PDB nasional (BPS & Kemenparekraf, 2023), sehingga pengembangan pariwisata Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, dan pembangunan yang inklusif (Ariyani & Fauzi,

2023).

Namun demikian dalam suatu sistem kerangka pembangunan berkelanjutan, pengembangan pariwisata harus mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang serta mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaannya (Seba, 2012). Dengan demikian, terbentuk beberapa konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) menjadi arah utama dalam pengembangan destinasi wisata, baik di Indonesia maupun secara global, karena pariwisata tidak lagi dipandang semata sebagai penggerak ekonomi jangka pendek, melainkan sebagai instrumen pembangunan jangka panjang yang menuntut perlindungan terhadap kelestarian sumber daya alam serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Pandangan tersebut sejalan dengan Sulistyadi, Eddyono, dan Hasibuan (2017) yang menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang melalui pengelolaan destinasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Dalam implementasinya, pembangunan pariwisata tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan manfaat ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga kelestarian lingkungan, mempertahankan nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal, serta melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi destinasi wisata. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan suatu destinasi wisata sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.

Lalu kemudian, *World Tourism Organization* menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan bertujuan memenuhi kebutuhan wisatawan dan industri pariwisata masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan pemerataan manfaat ekonomi. Prinsip tersebut diwujudkan melalui pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi, penguatan peran dan partisipasi masyarakat lokal, serta pengelolaan pariwisata yang mengedepankan pendekatan partisipatif dan ramah lingkungan sebagai upaya menciptakan keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan (Haribudiman et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan pariwisata, pariwisata berkelanjutan berlandaskan empat pilar utama yaitu, Manajemen Berkelanjutan (*sustainable management*), Manfaat Sosial dan Ekonomi bagi Komunitas Lokal (*socio-economic benefits*), Pelestarian Warisan Budaya (*cultural heritage conservation*) dan Pengelolaan lingkungan efektif dalam implementasinya pengembangan pariwisata harus memperhatikan tiga dimensi utama yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dalam menjaga keberlanjutan suatu destinasi wisata (Qodriyatun et al., 2018). Dengan itu, pariwisata berkelanjutan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk wisata ramah lingkungan, tetapi juga sebagai sistem pembangunan yang mengintegrasikan partisipasi publik, serta keseimbangan ekologi dan ekonomi. Melalui berbagai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa setiap tahap pengembangan wisata mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

hingga evaluasi dilakukan secara partisipatif (Ariyani & Fauzi, 2023). Terdapat beberapa bentuk wisata yang masuk kedalam kategori pariwisata berkelanjutan antara lain, pariwisata berbasis komunitas, agrowisata atau wisata pedesaan, wisata budaya, wisata konservasi serta ekowisata (Asmin, 2023).

Salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan adalah ekowisata, yang didefinisikan sebagai perjalanan yang bertanggung jawab secara ekologis ke kawasan alami (*pristine*) untuk menikmati dan menghargai keindahan alam sekaligus mendorong upaya konservasi (*World Conservation Union, 1996*). Sejalan dengan itu, Ekowisata merupakan bentuk produk wisata yang dikembangkan dalam kerangka pariwisata berkelanjutan di Indonesia (Qodriyatun et al., 2018). Melalui konsep ekowisata yang saat ini mulai mendapat perhatian serius ketika pemerintah dan berbagai lembaga masyarakat mengarahkan pengembangan wisata alam tidak hanya sebagai aktivitas konsumtif, tetapi juga sebagai sarana konservasi lingkungan dan pemberdayaan komunitas lokal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2022).

Sejak awal 2000-an, ekowisata berkembang sebagai alternatif terhadap pariwisata massal yang berpotensi merusak lingkungan, di mana ekowisata tidak lagi dipahami sebatas kunjungan ke alam, melainkan sebagai pendekatan pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi dengan masyarakat lokal sebagai aktor kunci dalam pengelolaan serta pelestarian sumber daya alam (Mu'tashim & Indahsari, 2021). Melalui pengembangan ekowisata, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, sementara wisatawan memperoleh pengalaman yang bersifat edukatif dan ekologis

secara berkelanjutan (Damiasih, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, *The International Ecotourism Society* menegaskan bahwa ekowisata merupakan perjalanan bertanggung jawab ke kawasan alami yang melestarikan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan pengalaman bagi wisatawan (TIES, 2000).

Perkembangan ekowisata mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, pemanfaatan keanekaragaman hayati, serta pelestarian budaya lokal, yang mendorong pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menetapkan pengembangan ekowisata dan desa wisata berbasis komunitas sebagai bagian dari strategi destinasi pariwisata berkelanjutan. Kebijakan ini tercermin dari penetapan sejumlah kawasan sebagai contoh keberhasilan ekowisata berbasis konservasi, seperti Raja Ampat, Taman Nasional Komodo, Tanjung Puting, dan Wakatobi, yang menekankan keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan keterlibatan aktif masyarakat lokal.

Dalam konteks regional, Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan strategis di bagian barat Indonesia yang memiliki tingkat keanekaragaman ekosistem laut dan pesisir yang tinggi, khususnya di wilayah Sumatera bagian utara. Wilayah ini terdiri atas lebih dari 2.400 pulau yang tersebar di kawasan Laut Natuna dan Selat Malaka, dengan karakteristik bentang alam yang didominasi oleh hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, serta pesisir berpasir putih sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (2024). Kondisi geografis dan ekologis tersebut menjadikan

Kepulauan Riau sebagai salah satu sentra potensial pengembangan ekowisata bahari yang tidak hanya berorientasi pada daya tarik wisata alam, tetapi juga menekankan aspek konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta fungsi edukatif dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Ekowisata di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan dinamika yang beragam dan tersebar di beberapa wilayah yang memiliki karakteristik sumber daya alam dan budaya yang khas. Di Kota Batam, pengembangan ekowisata diwujudkan melalui Desa Wisata Pandang Tak Jemu yang dikembangkan sebagai destinasi edukasi mangrove dan penanaman pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Riau (DLHK, 2024). Kegiatan ekowisata di wilayah ini mengintegrasikan program rehabilitasi mangrove dengan konsep *mangrove boardwalk*, sehingga wisatawan tidak hanya menikmati kawasan pesisir, tetapi juga memperoleh pengetahuan mengenai fungsi ekologis mangrove serta terlibat langsung dalam kegiatan konservasi. Selanjutnya, di Kabupaten Karimun, Pulau tulang memiliki potensi ekowisata berupa wisata kunang-kunang, gua karst, dan wisata bahari yang unik, dengan tingkat kesesuaian lahan yang mendukung pengembangan ekowisata secara berkelanjutan (Rachman & Thasimmim, 2020).

Sementara itu, Kabupaten Lingga dikenal dengan pengembangan ekowisata berbasis budaya dan sejarah yang memadukan pelestarian alam dengan warisan budaya Melayu, di mana pengembangan desa wisata diarahkan pada integrasi kearifan lokal dan konservasi sumber daya alam, seperti di Desa Mepar dan Desa Batu Berdaun yang dikembangkan sebagai desa wisata bahari dan budaya (Hafsar



et al., 2022). Di Kabupaten Natuna, pengembangan ekowisata berfokus pada potensi geologi dan bahari dengan ikon batuan granit besar di kawasan seperti Pantai Batu Kasah, Alif Stone Park, dan Pulau Senoa, yang dikembangkan melalui pendekatan *geo-ecotourism* untuk mendukung konservasi geologi dan ekosistem pesisir (Pratiwi et al., 2021). Di Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk dalam sepuluh destinasi ekowisata bahari prioritas nasional dengan aktivitas utama seperti snorkeling, diving, konservasi terumbu karang, dan pengamatan biota laut, yang didukung kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga konservasi internasional (Pristiwasa & Sari, 2024). Di sisi lain, Kabupaten Bintan sebagai ikon ekowisata bahari Kepulauan Riau memiliki kawasan unggulan seperti Sebang Lagoi, Desa Pengudang, dan Ekan Aculai yang menerapkan pendekatan *Community-Based Ecotourism* (CBET), dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wisata secara berkelanjutan.

Penelitian Haidawati et al., (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan Bintan dalam mengembangkan ekowisata berbasis komunitas disebabkan oleh keterlibatan peran aktif masyarakat lokal dalam manajemen dan penyelenggaraan wisata, konservasi hutan mangrove, dan penyediaan jasa wisata seperti homestay serta pemandu ekowisata. Kawasan ini juga menjadi contoh penerapan prinsip *sustainable coastal tourism* yang menyeimbangkan konservasi lingkungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, perkembangan ekowisata di Provinsi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran terhadap pariwisata berkelanjutan yang

tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal, yang diwujudkan melalui pengembangan wisata pantai partisipatif dan ekowisata berbasis masyarakat dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, serta pemanfaatan manfaat wisata (Maulani et al., 2024). Penguatan ekowisata ini juga didukung oleh keterkaitan sektor pariwisata dengan ekonomi kreatif, di mana subsektor kerajinan, kuliner, dan seni lokal menjadi sumber nilai tambah destinasi apabila didukung oleh promosi, pelatihan, dan kemitraan berkelanjutan (Tjeme et al., 2024).

Salah satu kawasan strategis adalah Kabupaten Bintan, yang memiliki letak geografis di jalur pelayaran internasional dan berperan sebagai destinasi wisata unggulan kawasan barat Indonesia, dengan kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret 2025 mencapai 17.619 kunjungan atau meningkat 79,51% dibandingkan bulan sebelumnya, didominasi wisatawan asal Singapura sebesar 53,86%, yang menegaskan kuatnya daya tarik internasional Bintan sebagai pintu masuk pengembangan ekowisata maritim di Kepulauan Riau (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2024). Pengembangan ekowisata di kabupaten bintan diwujudkan melalui penetapan sejumlah desa wisata sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023, yaitu Ekang Anculai, Sebung Lagoi, Berakit, Busung, Tosela, dan Pengudang, Mapur yang masing-masing memiliki karakteristik potensi wisata yang beragam. Demikian, di antara desa-desa tersebut, Desa Pengudang dinilai memiliki bentuk ekowisata yang lebih murni dan sesuai dengan prinsip *Community-Based Ecotourism* (CBET), karena menawarkan



kegiatan wisata mangrove, wisata bahari, edukasi lingkungan, serta praktik kearifan lokal yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Secara geografis, Desa Pengudang terletak di Kecamatan Teluk Sebong dan memiliki potensi ekowisata pesisir dan bahari yang tinggi dengan nilai ekologis yang menjadikannya sebagai laboratorium ekowisata pesisir di Kepulauan Riau (Yusnita et al., 2024). Meskipun masih berstatus sebagai desa wisata rintisan, Desa Pengudang telah menunjukkan komitmen melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan kemitraan dengan pihak akademik serta swasta dalam pengelolaan kawasan mangrove dan pantai. Namun, di balik potensi dan partisipasi masyarakat yang relatif tinggi, desa ini masih menghadapi tantangan dalam aspek manajemen, promosi, dan keberlanjutan ekonomi, serta sebagian masyarakat belum terlibat secara optimal dan masih berperan sebagai penonton, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekowisata yang besar dan kapasitas kelembagaan yang masih terbatas.

Melihat potensi besar yang dimiliki Desa Pengudang, keberhasilan pengembangan ekowisata tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam dan dukungan kebijakan pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial yang dimiliki masyarakat lokal. Modal sosial merupakan unsur fundamental dalam pembangunan berbasis komunitas karena mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki jaringan sosial, tingkat kepercayaan, serta norma-norma sosial yang mendorong terwujudnya kerja sama kolektif dalam mencapai tujuan bersama. Sejalan dengan pandangan tersebut, Rangkuty (2018) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan kekuatan yang bersumber dari adanya kepercayaan (*trust*),

norma (*norms*), dan jaringan sosial (*network*) yang terbangun dalam masyarakat, yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial tidak hanya menjadi perekat sosial, tetapi juga menjadi sumber daya strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena melalui kepercayaan dan jaringan yang kuat, masyarakat mampu mengakses berbagai peluang dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks ekowisata, keberadaan jaringan sosial memungkinkan terbangunnya hubungan yang erat antarwarga, antara masyarakat dengan pokdarwis, serta dengan aktor eksternal seperti pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Kepercayaan sosial menjadi prasyarat penting dalam pengelolaan ekowisata karena menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, mengurangi konflik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas konservasi dan pelayanan wisata. Sementara itu, norma sosial berfungsi sebagai pedoman perilaku kolektif yang mengatur praktik pemanfaatan sumber daya alam agar tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal. Dengan demikian, modal sosial berperan sebagai fondasi yang memungkinkan masyarakat Desa Pengudang untuk saling berkoordinasi, berbagi pengetahuan, membangun solidaritas, serta memperkuat kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola potensi ekowisata secara berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat.

Di Desa Pengudang, modal sosial tampak melalui keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hubungan antarwarga, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pengelola wisata. Modal sosial tersebut tercermin dalam praktik gotong royong, partisipasi warga dalam kegiatan wisata dan

konservasi, serta adanya kesediaan untuk bekerja sama dalam pengelolaan potensi ekowisata. Meskipun Desa Pengudang telah menunjukkan perkembangan sebagai desa wisata berbasis ekowisata dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Tetapi masih terdapat kesenjangan antara potensi ekowisata yang besar di Desa Pengudang dan kapasitas sosial masyarakat dalam mengelola serta mengembangkannya secara kolektif dan berkelanjutan. Maka demikian, dengan modal sosial yang ada masih memerlukan penguatan, khususnya dalam memperluas jejaring antar kelompok masyarakat, meningkatkan partisipasi warga secara merata, serta memperkuat peran masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan ekowisata.

Kesenjangan ini menuntut adanya kajian yang secara khusus menganalisis peran dan dinamika modal sosial masyarakat, baik dalam relasi horizontal maupun relasi vertikal, sebagai faktor penentu keberhasilan pengembangan ekowisata berbasis berkelanjutan. Menurut Robert D. Putnam (1993), modal sosial berfungsi sebagai mekanisme yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama melalui jaringan sosial, kepercayaan, dan norma bersama, sehingga mampu memperkuat kapasitas kolektif masyarakat dalam pembangunan berbasis komunitas.

Jika ditinjau dari dimensi horizontal dan vertikal, modal sosial horizontal (*bonding social capital*) merujuk pada hubungan antarindividu atau kelompok yang memiliki kedekatan nilai, norma, dan latar belakang sosial-budaya yang sama. Di Desa Pengudang, modal sosial *bonding* tercermin dalam kuatnya rasa kebersamaan, solidaritas sosial, dan praktik gotong royong yang masih terjaga dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas pariwisata berbasis masyarakat. Hubungan ini

berperan penting dalam menciptakan kohesi sosial, memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi wisata, serta mendorong partisipasi kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, modal sosial *bridging* mencerminkan hubungan horizontal yang lebih luas antar kelompok sosial yang berbeda, baik berdasarkan usia, profesi, maupun kepentingan, yang berfungsi untuk memperluas akses informasi, inovasi, dan peluang ekonomi dalam pengembangan ekowisata (Putnam, 2000).

Di sisi lain, modal sosial vertikal (*linking social capital*) menggambarkan relasi antara masyarakat lokal dengan aktor eksternal yang memiliki otoritas, kekuasaan, atau sumber daya yang lebih besar, seperti pemerintah daerah, lembaga akademik, investor, dan organisasi *non*-pemerintah (NGO). Hubungan vertikal ini berperan strategis dalam membuka akses terhadap sumber daya penting, seperti pelatihan kapasitas, pendanaan, pendampingan teknis, serta jaringan promosi dan pasar wisata.

Menurut *Michael Woolcock* (2001), modal sosial *linking* menjadi kunci keberhasilan pembangunan berbasis komunitas karena memungkinkan masyarakat lokal menjembatani kepentingan internal dengan struktur kelembagaan yang lebih luas. Namun demikian, efektivitas modal sosial vertikal sangat bergantung pada kualitas komunikasi, transparansi, dan tingkat kepercayaan antara masyarakat dan pihak eksternal. Apabila relasi yang terbangun bersifat *top-down* dan kurang partisipatif, maka masyarakat cenderung menjadi objek pembangunan dan partisipasinya bersifat pasif. Sebaliknya, jika hubungan tersebut dibangun atas dasar kepercayaan, dialog, dan kolaborasi yang setara, maka pengembangan

ekowisata berkelanjutan akan lebih kuat dan inklusif karena masyarakat merasa memiliki peran nyata dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan ekowisata.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara modal sosial dan pengembangan ekowisata. Seperti Penelitian Sumaryam et al. (2024) di Gresik menunjukkan bahwa kepercayaan dan jaringan sosial merupakan faktor utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada ekowisata mangrove. Penelitian Hidayat et al. (2024) di Desa Sugian juga mengungkap bahwa keterlibatan multiaktor dan kepercayaan antarwarga menjadi kunci keberhasilan ekowisata berkelanjutan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek ekologis dan teknis pengelolaan wisata, tetapi belum mengkaji secara mendalam peran dimensi sosial, terutama hubungan horizontal antarwarga dan vertikal dengan pemerintah serta pemangku kepentingan, dalam mendukung keberlanjutan ekowisata. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti bermaksud meneliti Modal Sosial Masyarakat Desa Pegudang dalam Pengembangan Ekowisata, guna memahami bagaimana peran modal sosial tersebut baik horizontal maupun vertikal demi mendukung tercapainya ekowisata berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Modal sosial yang terjadi di masyarakat Desa Pegudang dalam mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan secara horizontal dan vertikal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kualitas peran modal sosial yang terjadi di masyarakat desa pegudang dalam mendukung keberlanjutan ekowisata secara horizontal dan vertikal agar terdapat penguatan relasi sosial yang signifikan dalam pengelolaan ekowisata.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan nilai guna. Baik dalam manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Maka, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pembelajaran terhadap pengembangan kajian ilmu sosiologi, khususnya mengenai Modal Sosial dalam pengembangan ekowisata. Selain itu, penelitian ini juga dapat di jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pengelola ekowisata, dan masyarakat Desa Pegudang dalam memperkuat hubungan sosial serta kolaborasi antarwarga untuk mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial guna meningkatkan partisipasi, rasa memiliki, dan tanggung jawab bersama terhadap kelestarian lingkungan dan daya tarik wisata.